

DANA DESA, SDGs DESA DAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIANJUR DAN BOGOR

Village Fund, Village SDGs and Village Development in Cianjur and Bogor District

Sandi Asep Ramdani¹, Bayu Kharisma², & Ferry Hadiyanto³

Info Artikel

¹Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Jakarta,
sandi.ramdani@kemenkeu.go.id

²Universitas Padjadjaran, Bandung,
bayu.kharisma@unpad.ac.id

³Universitas Padjadjaran, Bandung,
ferry.hadiyanto@unpad.ac.id

Riwayat Artikel :

Diterima 3 Oktober 2024

Direvisi 25 November 2024

Disetujui 6 Desember 2024

Tersedia online 7 Desember 2024

JEL Classification : H72, H77,
R51

Abstract

Cianjur and Bogor Regencies in West Java receive substantial Village Fund allocations but exhibit significant differences in IDM values. This study aims to analyze the contribution of village funds to Village SDGs achievement and their impact on IDM values in both regencies from 2018-2023, using mapping of village fund activity codes, panel data regression, and difference in differences (DiD). The results show that village fund activities in both regencies primarily support Village SDGs number 9 (Village Infrastructure and Innovation). However, in Cianjur, IDM is most influenced by activities in Village SDGs number 13, while in Bogor, SDGs number 16 has the greatest impact. DiD analysis reveals that implementing Village SDGs in Bogor is more effective than in Cianjur. These findings suggest that Village Government need to optimize IDM achievements through Village Fund activities depends on each village's characteristics, with a balanced focus beyond physical infrastructure being crucial for rural development.

Keywords : Bogor, Cianjur, Village Development Index, Village Fund, Village SDGs

Abstrak

Kabupaten Cianjur dan Bogor merupakan dua Kabupaten di Jawa Barat yang menerima anggaran Dana Desa yang cukup tinggi, namun menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam nilai IDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dari dana desa terhadap capaian SDGs Desa dan juga menganalisis pengaruhnya terhadap nilai IDM di Kabupaten Cianjur dan Bogor pada periode 2018-2023. Metode analisis yang digunakan yaitu *mapping* kode kegiatan dana desa ke dalam SDGs Desa, analisis regresi data panel dan *difference in differences* (DiD). Hasil penelitian menemukan bahwa kegiatan dana desa di Cianjur dan Bogor lebih banyak digunakan untuk mendukung capaian SDGs Desa nomor 9 (Infrastruktur dan Inovasi Desa). Namun demikian, nilai IDM di Cianjur justru paling banyak dipengaruhi oleh kegiatan pada SDGs Desa nomor 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim), sedangkan nilai IDM di Bogor paling banyak dipengaruhi oleh kegiatan pada SDGs nomor 16 (Desa Damai Berkeadilan). Adapun hasil DiD menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa di Bogor dinilai lebih efektif daripada di Cianjur. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan capaian IDM melalui

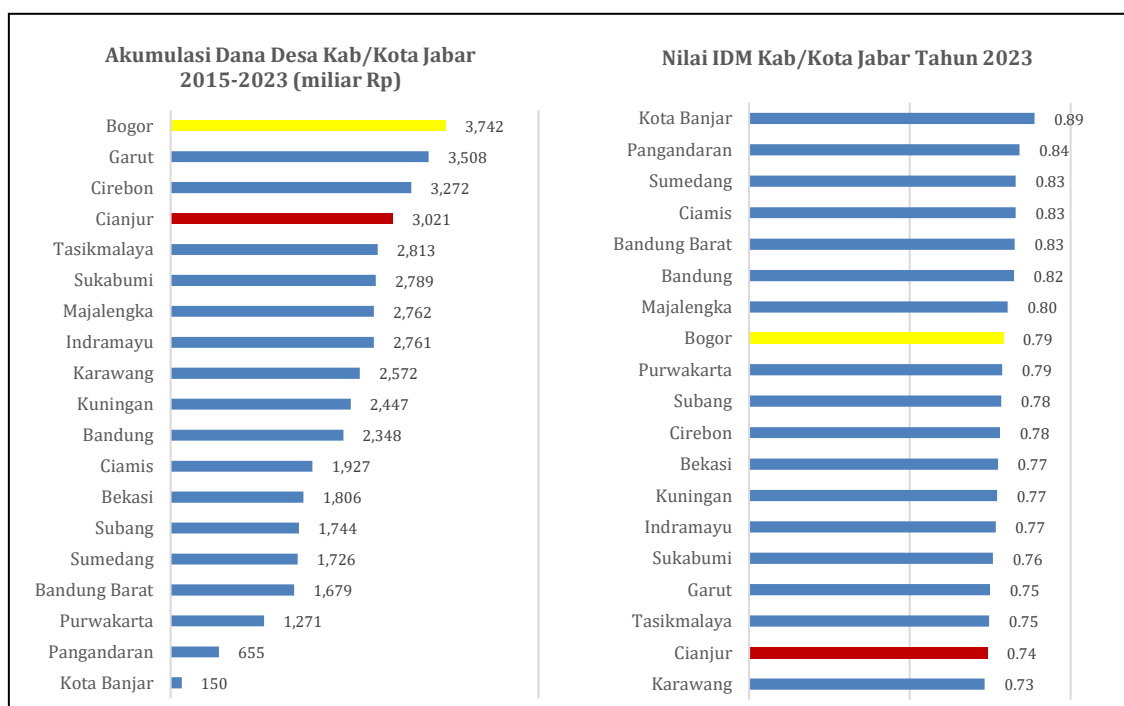
penyelarasan kegiatan Dana Desa ke dalam SDGs Desa dengan melihat karakteristik dari masing-masing desa itu sendiri. Selain itu, keseimbangan penggunaan Dana Desa yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik juga berperan sangat penting dalam peningkatan pembangunan daerah perdesaan.

Kata kunci: Bogor, Cianjur, Dana Desa, Indeks Desa Membangun, SDGs Desa

1. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan program pembangunan daerah perdesaan di Indonesia yang turut melibatkan peran masyarakat desa untuk membangun daerahnya atau biasa disebut dengan program *community driven development/CDD* (Arifin et al., 2020; Kemenkeu, 2017). Program Dana Desa tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2015 dengan disahkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer kepada Pemerintah Desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Desa, 2016; Sutisna & Qibthiyah, 2023).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki alokasi Dana Desa yang cukup tinggi. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat juga memiliki jumlah desa yang tersebar di berbagai Kabupaten. Namun, efektivitas dari alokasi Dana Desa yang diterima desa-desa di Jawa Barat sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika melihat perbedaan dalam nilai Indeks Desa Membangun (IDM) antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.



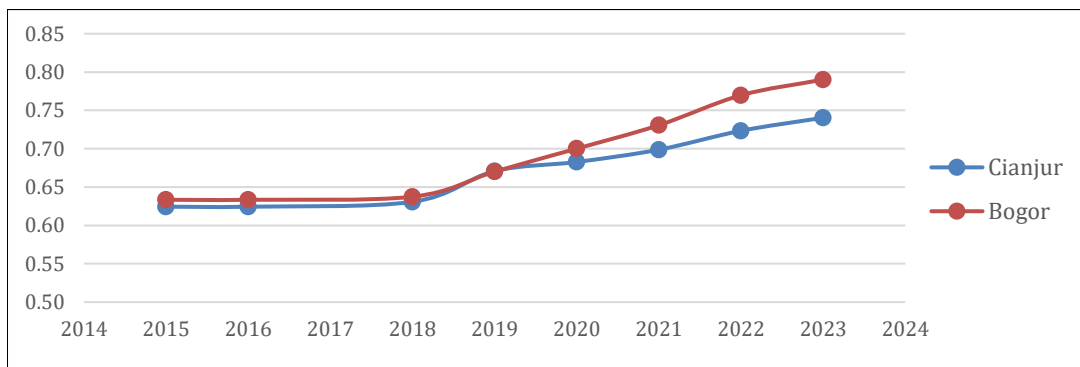
Sumber: Kemenkeu dan Kemendesa PDTT

Gambar 1. Akumulasi Anggaran Dana Desa dan IDM Kab/Kota di Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki realisasi Dana Desa dan nilai IDM yang beragam. Kabupaten Bogor yang memiliki akumulasi

dana desa paling tinggi justru memiliki rata-rata nilai IDM urutan ke-8, sedangkan Kota Banjar yang memiliki akumulasi dana desa yang paling rendah justru memiliki rata-rata nilai IDM yang paling tinggi. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dapat secara langsung digunakan untuk analisis lebih mendalam mengingat jumlah desa di Kota Banjar yaitu sebanyak 18 Desa, jauh lebih sedikit daripada jumlah desa di Kabupaten Bogor yang berjumlah 416 Desa.

Fenomena yang cukup menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam justru terjadi pada kondisi di Kabupaten Cianjur dan Bogor. Kabupaten Cianjur dan Bogor menerima alokasi Dana Desa yang tinggi dan memiliki jumlah Desa yang relatif sama (Cianjur 354 Desa, Bogor 416 Desa), namun menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam nilai IDM dimana Kabupaten Cianjur memiliki nilai IDM yang relatif rendah jika dibandingkan Kabupaten Bogor. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan IDM.



Sumber: Kemendesa PDTT (2015-2023)

Gambar 2. Nilai IDM Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor Tahun 2015-2023

Selain itu, Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan nilai IDM lebih signifikan sejak tahun 2020-2023 yang dapat dilihat pada Gambar 2, hal tersebut dapat terjadi kemungkinan karena pengelolaan dana desa yang lebih baik dan berfokus pada sektor-sektor yang lebih strategis. Sementara itu, Kabupaten Cianjur masih memerlukan perhatian lebih lanjut dalam hal pengelolaan dana desa dalam percepatan pembangunan desa.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan hubungan antar dana desa dengan indeks desa membangun (IDM) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Kurniawan & Rauf (2022) di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Vecky Masinambow (2021) di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa berkorelasi positif terhadap peningkatan nilai IDM. Namun, tidak semua penelitian menemukan hasil yang serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Yulitasari & Tyas (2020) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IDM. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kapasitas manajerial aparatur desa, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi yang kurang optimal.

Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam hubungan antara Dana Desa dan IDM. Di satu sisi, alokasi Dana Desa yang besar seharusnya dapat mendorong pembangunan desa dan peningkatan IDM. Namun, di sisi lain, tanpa pengelolaan yang baik dan

partisipasi aktif dari masyarakat, Dana Desa tidak selalu membawa dampak yang diharapkan. Selain itu, menurut Kemendesa (2020), kebijakan SDGs Desa bertujuan untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan, sehingga adanya penyelarasan kegiatan dana desa ke dalam capaian SDGs Desa seharusnya dapat mempercepat peningkatan nilai IDM. Namun, di sisi lain, menurut penelitian oleh Nadia & Mahi (2023) dan Permatasari et al. (2021), kebijakan SDGs Desa belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik karena minimnya pemahaman dari Kepala Desa terkait dengan program SDGs Desa.

Memperhatikan hal tersebut, penelitian ini akan mencoba mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) dengan melakukan analisis *mapping* kegiatan Dana Desa yang mendukung capaian SDGs Desa untuk mengetahui SDGs Desa nomor berapa yang memiliki realisasi kegiatan paling tinggi dan paling berpengaruh terhadap nilai IDM di Kabupaten Cianjur dan Bogor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dari realisasi kegiatan Dana Desa yang mendukung SDGs Desa terhadap perubahan nilai IDM, serta mengukur dampak dari kebijakan SDGs Desa tersebut di Kab. Cianjur dan Bogor. Adapun secara teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan analisis empiris terkait pengaruh realisasi Dana Desa dan SDGs Desa terhadap pembangunan Desa (IDM) di Kab. Cianjur dan Bogor dengan menggunakan data terkini, sedangkan secara praktis (guna laksana), penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan kepada Pemerintah Pusat (Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kemendagri), maupun Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dan Desa dalam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari data transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa (Kemenkeu, 2023). Dana Desa mulai disalurkan kepada Pemerintah Desa pada tahun 2015 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Dana Desa merupakan suatu bentuk pengakuan Negara terhadap unit pemerintahan paling kecil di Indonesia yaitu Desa. Penyaluran Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa (Kemenkeu, 2020a).

Pembagian besaran perhitungan alokasi Dana Desa berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2023, perhitungan alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan proporsi alokasi yang terdiri dari alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja (Kemenkeu, 2022). Adapun perkembangan formula perhitungan alokasi Dana Desa dari tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Perkembangan Formula Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2023

Proporsi Alokasi Dana Desa	2015-2017	2018	2019	2020	2021	2022-2023
Alokasi Dasar	90%	77%	72%	69%	65%	65%
Alokasi Formula	10%	20%	25%	28%	31%	30%

Proporsi Alokasi Dana Desa	2015-2017	2018	2019	2020	2021	2022-2023
Alokasi Afirmasi	-	3%	3%	1,5%	1%	1%
Alokasi Kinerja	-	-	-	1,5%	3%	4%

sumber: Aji & Qibthiyah (2023); Kemenkeu (2020c, 2021b, 2022b)

SDGs Desa

SDGs Desa merupakan upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Konsep Pembangunan Desa yang berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan (Kemendesa, 2020b, 2020a).

Target dan sasaran SDGs Desa didasarkan pada target SDGs Nasional dan lokalisasi dari target global sehingga SDGs Desa diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs nasional hingga mencapai 74%. Hal tersebut dihitung berdasarkan dua aspek, yaitu aspek kependudukan dimana sebanyak 43% penduduk Indonesia tinggal di desa, dan aspek kewilayahan dimana 91% wilayah Indonesia merupakan daerah perdesaan (Iskandar, 2024; Permatasari et al., 2021).

Berbeda dengan SDGs Nasional yang memiliki 17 tujuan (*goals*), SDGs Desa memiliki 18 tujuan, yaitu Desa Tanpa Kemiskinan (SDGs Desa 1), Desa Tanpa Kelaparan (SDGs Desa 2), Desa Sehat Sejahtera (SDGs Desa 3), Pendidikan Desa Berkualitas (SDGs Desa 4), Keterlibatan Perempuan Desa (SDGs Desa 5), Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi (SDGs Desa 6), Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan (SDGs Desa 7), Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata (SDGs Desa 8), Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan (SDGs Desa 9), Desa Tanpa Kesenjangan (SDGs Desa 10), Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman (SDGs Desa 11), Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan (SDGs Desa 12), Desa Tanggap Perubahan Iklim (SDGs Desa 13), Desa Peduli Lingkungan Laut (SDGs Desa 14), Desa Peduli Lingkungan Darat (SDGs Desa 15), Desa Damai Berkeadilan (SDGs Desa 16), Kemitraan Untuk Pembangunan Desa (SDGs Desa 17), dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif (SDGs Desa 18).

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun atau IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial atau IKS, Indeks Ketahanan Ekonomi atau IKE, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan atau IKL. Penyusunan IDM didasarkan pada konsep yang menyebutkan bahwa pembangunan desa merupakan suatu proses akumulasi dari beberapa dimensi yaitu dimensi sosial, ekonomi dan ekologi yang mana ketiganya saling memperkuat dan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa (Kemendesa, 2016).

Kondisi desa yang baik dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi akan ditunjukkan oleh nilai IDM yang semakin tinggi (Hariwibowo & Wardhana, 2023). Perhitungan IDM mengintegrasikan perhitungan pada aspek Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Permukiman melalui nilai IKS, aspek Keberagaman Produksi Masyarakat, Akses ke Pusat Perdagangan, Akses Logistik, Akses ke Perbankan, dan Akses Wilayah melalui nilai IKE, dan aspek Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, dan Respon Bencana melalui nilai IKL (Hilmawan et al., 2023).

Peraturan Kementerian Desa dan PDTT nomor 2 Tahun 2016 menjadi peraturan yang mendasari penyusunan dan perhitungan IDM. Nilai IDM dihasilkan dari rata-rata nilai IKS, IKE, dan IKL. Setiap indeks pembentuk dari nilai IDM dibangun dari beberapa variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi beberapa indikator yang memiliki nilai antara 0 s.d. 5 dimana makna yang positif dari penilaian tersebut ditunjukkan dengan skor yang semakin tinggi. Selanjutnya nilai total Skor Indikator tersebut akan ditransformasikan ke dalam nilai indeks dengan nilai antara 0 s.d. 1.

Selain sebagai indikator pembangunan desa, nilai IDM juga digunakan untuk mengklasifikasikan status kemajuan dan kemandirian desa menjadi 5 (lima) jenis, yaitu: Desa Mandiri (Desa Sembada) dengan nilai IDM $> 0,8155$; Desa Maju (Desa Pra-Sembada) dengan nilai IDM $> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$; Desa Berkembang (Desa Madya) dengan nilai IDM $> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$; Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) dengan nilai IDM $> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$; dan Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) dengan nilai IDM $\leq 0,4907$.

Intergovernmental Transfer Theory

Menurut teori transfer antar-level pemerintahan (*intergovernmental transfer*) yang dikemukakan oleh Rosen & Gayer (2014), disebutkan bahwa dana transfer seperti dana desa merupakan sumber pendapatan yang penting bagi Pemerintah Desa. Pendapatan transfer tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan penyediaan barang publik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara riil, peningkatan barang publik tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik dasar yang dibutuhkan dan dapat diakses oleh penduduk lokal terutama masyarakat miskin.

Menurut Fitriana & Qibthiyah (2021), Dana Desa dapat dikategorikan sebagai *conditional non-matching grant* karena Dana Desa ditransfer kepada Pemerintah Desa tanpa keharusan adanya dana pendamping meskipun sebagian penggunaannya tetap ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai program/kegiatan tertentu.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dana desa dengan indeks desa membangun (IDM) adalah berkorelasi positif, dimana peningkatan dana transfer berupa dana desa akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan barang publik sehingga kesejahteraan masyarakat desa yang diukur dengan nilai IDM juga akan meningkat.

Kajian Empiris Sebelumnya

Beberapa kajian empiris yang dilakukan di Indonesia menyimpulkan hasil yang beragam. Contohnya seperti penelitian oleh Andari & Fitria (2023) yang menganalisis pengaruh dari Dana Desa terhadap nilai IDM di Indonesia pada tahun 2018-2022 dengan regresi *Fix Effect Model SUR PCSE*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan status desa di Indonesia dimana peningkatan dana desa sebesar 1% akan meningkatkan nilai IDM sebesar 0,0013.

Penelitian oleh Aji & Qibthiyah (2023) juga menyimpulkan hal yang sama, dimana penelitian tersebut menganalisis pengaruh dari Dana Desa terhadap perubahan status Desa di Indonesia (desa tertinggal, berkembang, mandiri). Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebagai ukuran pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode *first*

difference fixed effect dengan menambahkan *covariate* berupa ADD, Dana Bagi Hasil, PADes, Bantuan Keuangan, PDRB per Kapita, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Bekerja, Deflator PDRB dan *Dummy* Pulau. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Desa memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan status desa, meskipun besaran koefisien regresinya menunjukkan dampak yang kecil secara ekonomi.

Kajian lainnya dengan metode yang berbeda juga dilakukan oleh Nadia & Mahi (2023) yang menggunakan metode *OLS cross-sectional multiple linear regression* dengan data antara tahun 2018-2020, Ekawati et al. (2022) yang menggunakan metode kualitatif melalui *in-dept interview*, dan Yusuf & Khoirunurrofik (2022) yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik *mapping* dan *tagging*. Secara umum, ketiga penelitian tersebut menyimpulkan hasil yang sama yaitu Dana Desa memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan status kemajuan dan kemandirian Desa atau nilai IDM di Indonesia.

Selain itu, penelitian dengan ruang lingkup pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kecamatan juga dilakukan oleh Halim & Taryani (2023) yang meneliti pada lingkup Provinsi NTT dengan metode regresi data panel *Fixed Effect Model*, Iftitah & Wibowo (2022) pada lingkup Kabupaten Gowa dengan metode regresi data panel *Random Effect Model*, Vecky Masinambow (2021) pada lingkup Kabupaten Minahasa Tenggara dengan metode *multiple linier regression* data panel, Kurniawan & Rauf (2022) pada lingkup Kabupaten Kuantan Singingi dengan data primer melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi, serta Rezkia & Yunani (2023) pada lingkup Kecamatan Barabai dengan metode regresi data panel *Random Effect Model*. Secara umum, hasil dari kelima penelitian tersebut juga menyatakan hal yang sama yaitu Dana Desa berpengaruh signifikan dalam meningkatkan nilai IDM pada lingkup wilayah penelitian tersebut.

Sementara itu, kajian empiris yang menyimpulkan hasil berlainan dilakukan oleh Hilmawan et al. (2023) yang menganalisis korelasi Dana Desa, BUMDes, PADes dengan nilai IDM. Penelitian ini menggunakan data *cross-section* dengan tiga metode analisis yaitu *OLS*, *Difference in Difference (DiD)*, dan *Structural Equation Modelling (SEM)*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Dana Desa berkorelasi positif terhadap IDM, namun hasil dengan DiD menunjukkan bahwa kebijakan pemberian lebih banyak Dana Desa belum sepenuhnya mendukung peningkatan nilai IDM yang lebih baik. Adapun hasil dengan SEM menunjukkan bahwa PADes memiliki peran yang penting dalam peningkatan nilai IDM.

Selain itu, penelitian lain yang menyimpulkan hasil yang berlainan adalah penelitian oleh Yulitasari & Tyas (2020) yang meneliti hubungan Dana Desa dan nilai IDM pada lingkup Provinsi Jawa Tengah dengan metode regresi data panel tahun 2018-2019. Hasilnya menyimpulkan bahwa besaran Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai IDM, dimana faktor-faktor lain di luar dana desa lebih berpengaruh terhadap nilai IDM di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, terdapat pula penelitian yang menganalisis keterkaitan Dana Desa dengan pencapaian SDGs Desa di Indonesia. Ronaldo & Suryanto (2022) melakukan penelitian terkait *Green Finance* dan SGDs di Indonesia dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang diproses dengan Smart-PLS. Hasil penelitian menyebutkan bahwa *Green Finance* memiliki arti penting dalam pencapaian SDGs dan dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan serta dapat mendorong inovasi teknologi hijau dan usaha mikro ramah lingkungan dan selanjutnya mengarah pada pencapaian SDGs.

Penelitian lainnya dengan ruang lingkup pada tingkat Kecamatan dan Desa juga dilakukan oleh Afandi et al. (2023) yang melakukan penelitian di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dengan menggunakan data primer dengan metode survey, dan penelitian oleh Triastuti (2023) yang melakukan penelitian di Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut dengan menggunakan metode review dan mapping dokumen. Hasil dari kedua penelitian tersebut secara umum menyatakan bahwa penerapan SDGs Desa telah dilakukan di Desa Pelitaasih dan Desa-desanya di Kecamatan Kedungjati, penerapan SDGs Desa juga berpengaruh signifikan terhadap nilai IDM.

Sementara itu, penelitian oleh Marianti et al. (2023) yang menggunakan data primer melalui metode wawancara dan review dokumen menyatakan bahwa Kalimantan dan Sulawesi menjadi wilayah dengan realisasi penggunaan Dana Desa tertinggi untuk kegiatan energi alternatif dan terbarukan. Untuk mencapai SDGs no 7, alokasi Dana Desa untuk pengembangan energi terbarukan masih perlu ditingkatkan khususnya di pulau Jawa. Pembangunan Desa tidak hanya fokus pada infrastruktur saja, namun keterjangkauan Masyarakat desa untuk akses energi terbarukan juga penting.

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Permatasari et al. (2021) yang melakukan penelitian terkait pengukuran efektivitas program Dana Desa dalam pencapaian sasaran SDGs Nasional dengan menggunakan metode FGD, *content analysis*, *mapping* dan *tagging* kode kegiatan Dana Desa ke dalam indikator SDGs Nasional. Penelitian tersebut menemukan bahwa Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur yaitu berkaitan dengan capaian SDG 9 dan SDG 11, sedangkan beberapa target SDG lainnya diabaikan. Hal tersebut diakibatkan karena masih banyak Kepala Desa yang belum memiliki pengetahuan dan kesadaran terkait SDGs. Adanya adaptasi SDGs Nasional menjadi SDGs Desa diharapkan mampu mendorong pencapaian SDGs Nasional.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, penyaluran Dana Desa di Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa yang diukur dengan nilai IDM. Namun demikian, pada beberapa daerah, pengelolaan dana desa yang kurang efektif dan optimal menyebabkan pelaksanaan transfer Dana Desa tersebut belum sepenuhnya berpengaruh signifikan terhadap kenaikan nilai IDM seperti yang diharapkan.

Adapun pernyataan hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini didasarkan pada teori transfer antar-level pemerintahan yang menyebutkan bahwa transfer dana desa akan meningkatkan anggaran Pemerintah Desa untuk penyediaan barang publik sehingga pembangunan di daerah perdesaan yang diukur dengan nilai IDM juga akan meningkat (Rosen & Gayer, 2014). Meskipun dalam beberapa kajian empiris menyimpulkan hasil yang berbeda, namun pengembangan hipotesis dalam penelitian ini tetap didasarkan pada konsep teoritis yang relevan sehingga hipotesis yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan konsisten (Swan & Martin, 1994). Memperhatikan hal tersebut, maka hubungan kausalitas antar-variabel yang disusun menjadi pernyataan hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- H₁:** Proporsi dana desa yang mendukung SDGs Desa diduga memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Cianjur dan Bogor
- H₂:** Adanya kebijakan SDGs Desa diduga berdampak memberikan perbedaan positif dan signifikan dalam perubahan nilai IDM di Kabupaten Cianjur dan Bogor.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari aplikasi dan laman resmi Instansi Pemerintah. Data dana desa dalam penelitian ini berasal dari dataset aplikasi OMSPAN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sedangkan data IDM berasal dari laman resmi Kementerian Desa dan PDTT. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan dari data *cross-section* dan data *time series*. Populasi data adalah seluruh desa di Kabupaten Cianjur yang menerima dana desa yaitu sebanyak 354 desa, dan seluruh desa di Kabupaten Bogor yang menerima dana desa yaitu sebanyak 416 desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode *mapping*, regresi data panel dan *difference in difference (DiD)*. Adapun sebagai alat bantu dalam perhitungan statistik, penelitian ini menggunakan aplikasi Ms. Excel 2021 dan Stata 17.0.

Proses *mapping* kegiatan dana desa yang mendukung capaian SDGs Desa merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Permatasari et al. (2021) dan Iskandar (2024). Adapun model persamaan regresi data panel dan DiD yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini merujuk pada model persamaan yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Halim & Taryani (2023), Villa (2016), Hilmawan et al. (2023) dan Ramdani (2024).

Tahapan analisis pertama sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan regresi data panel dan *DiD* yaitu proses *mapping* kode kegiatan dana desa yang mendukung capaian SDGs Desa yang dilakukan untuk mengetahui besaran jumlah realisasi dana desa yang digunakan untuk mendukung capaian masing-masing tujuan SDGs Desa. Proses *mapping* per kode kegiatan dana desa ke dalam masing-masing tujuan SDGs Desa tersebut merujuk pada hasil penelitian oleh Permatasari et al. (2021) dan Iskandar (2024) sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Selanjutnya, untuk menguji Hipotesis 1 yang mengukur kontribusi proporsi dana desa yang mendukung SDGs Desa terhadap nilai IDM di Kabupaten Cianjur dan Bogor, digunakan persamaan regresi data panel tanpa *covariate* yang telah digunakan sebelumnya oleh Halim & Taryani (2023) dengan penjelasan sebagai berikut:

$$idm_{it} = \alpha + \sum_{i=1}^{18} \beta psdgs_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- *Idm* : Indeks Desa Membangun (IDM)
- α : Konstanta/Intersep
- β : Koefisien Variabel
- *Vill_SDGs* : Proporsi realisasi kegiatan SDGs Desa Nomor ke-1 sampai 18 terhadap keseluruhan realisasi dana desa
- *i* : unit *cross-section* Desa di Kab. Cianjur dan Kab. Bogor
- *t* : unit tahun (2018-2023)
- ε : *error term*

Setelah itu, untuk menguji Hipotesis 2 yang mengukur dampak dari pelaksanaan program SDGs Desa terhadap perubahan nilai IDM di Kabupaten Cianjur dan Bogor, digunakan persamaan *difference in differences (DiD)* tanpa *covariate* yang telah digunakan sebelumnya oleh Villa (2016), Hilmawan et al. (2023) dan Ramdani (2024), dengan penjelasan sebagai berikut:

$$idm_{it} = \alpha_i + \beta Treat_{it} + \delta_t + \gamma(Treat_{it} \cdot t) + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

dengan:

$$\gamma = (idm_{treat.after} - idm_{control.after}) - (idm_{treat.before} - idm_{control.before})$$

Keterangan:

- *idm* : Indeks Desa Membangun
- *Treat* : Kelompok variabel yang menerima *treatment* yang diukur dengan *dummy variable*
- *t* : Kelompok variabel *dummy time* dimana efek waktu tersebut ditangkap dengan parameter δ
- *Treat_{it}t* : Variabel interaksi antara parameter yang dijelaskan di atas
- ε : *error term*

Penjelasan kriteria kelompok *treatment* dan *control*:

- Kelompok *treatment* dalam penelitian ini dibedakan dengan kriteria: nilai 1 jika desa memiliki realisasi dana desa yang mendukung capaian SDGs Desa yang lebih tinggi dari rata-rata Desa lainnya, dan nilai 0 jika sebaliknya dan diperlakukan sebagai kelompok *control*.
- Periode *treatment* dimulai sejak kebijakan SDGs Desa diberlakukan dimana nilai 1 pada periode *after treatment* yaitu tahun 2021-2023, dan nilai 0 untuk *before treatment* yaitu tahun 2018-2020.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif lingkup Kabupaten Cianjur dan Bogor dapat dilihat pada Tabel di Lampiran 2. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata desa di Kabupaten Cianjur memiliki nilai IDM sebesar 0,7098 dengan standar deviasi sebesar 0,0884, sedangkan rata-rata desa di Kabupaten Bogor memiliki nilai IDM sebesar 0,7448 dengan standar deviasi sebesar 0,0877. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa desa-desa di Cianjur dan Bogor rata-rata telah berstatus Desa Maju namun desa-desa di Cianjur memiliki rata-rata nilai IDM yang lebih rendah daripada desa-desa di Bogor dengan variasi yang lebih tinggi.

Sementara itu untuk data dana desa, diketahui bahwa rata-rata desa di Kabupaten Cianjur menerima dana desa sekitar Rp 1,11 miliar setiap tahunnya dengan dana desa paling tinggi sebesar Rp 2,5 miliar yang diterima oleh Desa Sukanagalih pada tahun 2022. Selain itu, terdapat pula 5 Desa yang sama sekali tidak berhasil merealisasikan dana desa pada tahun 2020 dan 2021 karena terkendala Pandemi Covid-19 yaitu Desa Sukamanah, Desa Munjul, Desa Sukalaksana, Desa Cimacan, dan Desa Sindangraja.

Sedangkan untuk Kabupaten Bogor, rata-rata desa menerima dana desa yang sedikit lebih tinggi dari Cianjur yaitu sekitar Rp 1,15 miliar setiap tahunnya dengan dana desa paling tinggi sebesar Rp 3,2 miliar yang diterima oleh Desa Cisarua pada tahun 2021. Selain itu, terdapat pula 22 desa di Bogor yang memiliki realisasi dana desa 0 pada tahun 2022 dan 2023 yaitu Cidokom, Ciangsana, Tarikolot, Situsari, Cibadung, Cibinong, Pabangbon, Cidokom, Rabak, Citapen, Cipayung Girang, Cipelang, Parakan, Kota Batu, Sinarsari, Bojong, Selawangi, Pasir Tanjung, Buanajaya, Tonjong, Leuwisadeng, dan Gunung Malang. Berdasarkan data tersebut, jika dibandingkan dengan Kabupaten Cianjur, desa-desa di Kabupaten Bogor menerima rata-rata dana desa yang lebih tinggi, namun dengan desa yang tidak berhasil merealisasikan dana desa juga lebih tinggi, artinya dari sisi percepatan realisasi, desa-desa di Cianjur lebih baik daripada desa-desa di Bogor.

Adapun untuk realisasi dana desa yang mendukung capaian SDGs Desa, Kabupaten Cianjur dan Bogor memiliki variasi yang cukup beragam dan luas. Hal tersebut mencerminkan

perbedaan prioritas dan kebutuhan antar desa dalam kedua wilayah. Untuk SDGs Desa 1 hingga 8 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan ekonomi, memiliki realisasi yang relatif lebih kecil dibandingkan sektor infrastruktur seperti SDGs Desa 9 yang mendapatkan porsi terbesar. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama bagi desa-desa di Cianjur dan Bogor. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa desa-desa di Cianjur dan Bogor masih menghadapi tantangan dalam penggunaan dana untuk sektor-sektor selain pembangunan infrastruktur.

Secara keseluruhan, penggunaan dana desa untuk SDGs Desa di kedua wilayah ini mengindikasikan fokus yang dominan pada pembangunan infrastruktur fisik, dengan porsi yang lebih kecil untuk tujuan sosial dan lingkungan, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan keberlanjutan lingkungan. Ini menandakan bahwa meskipun ada kemajuan di bidang infrastruktur, keseimbangan dalam penggunaan dana desa untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya masih perlu ditingkatkan.

Hasil Mapping Kode Kegiatan Dana Desa yang Mendukung SDGs Desa

Untuk mengetahui seberapa besar realisasi kegiatan dana desa yang mendukung capaian SDGs Desa, dilakukan *mapping* kegiatan dana desa ke dalam sasaran SDGs Desa di Kabupaten Cianjur dan Bogor yang didasarkan pada penelitian dari Permatasari et al. (2021). Hasil *mapping* tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil *mapping*, dapat diketahui bahwa selama periode 2018-2023, kegiatan dana desa di Kabupaten Cianjur dan Bogor paling banyak digunakan untuk mendukung capaian SDGs Desa nomor 9 (Infrastruktur dan Inovasi Desa) dengan proporsi sebanyak 46,32% untuk Cianjur dan 38,38% untuk Bogor. Pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan terkait dengan penggunaan dana desa, disebutkan bahwa mayoritas desa-desa memang cenderung merealisasikan dana desa untuk pembangunan yang dapat terlihat hasilnya langsung seperti pembangunan infrastruktur fisik (Marianti et al., 2023; Permatasari et al., 2021; Rezkia & Yunani, 2023; Watts et al., 2019).

Selain untuk SDGs Desa nomor 9, kegiatan dana desa di Kabupaten Cianjur dan Bogor juga cukup banyak digunakan untuk mendukung capaian SDGs Desa nomor 2 (Desa Tanpa Kelaparan) dan SDGs Desa nomor 3 (Desa Sehat dan Sejahtera). Hal tersebut berkaitan erat dengan program prioritas nasional percepatan penurunan *prevalensi stunting* yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dimana program tersebut salah satunya menggunakan dana desa untuk kegiatan desa siaga kesehatan dan penyelenggaraan posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu).

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Dana Desa yang Mendukung Capaian SDGs Desa untuk Kabupaten Cianjur dan Bogor berdasarkan Hasil Mapping Tahun 2018-2023

SDGs Desa	Cianjur		Bogor	
	Jumlah Realisasi	%	Jumlah Realisasi	%
SDGs Desa 1	1.767.718.600	0,07%	1.243.362.580	0,04%
SDGs Desa 2	138.563.303.631	5,87%	195.487.599.639	6,75%
SDGs Desa 3	186.768.309.624	7,91%	239.698.330.568	8,28%
SDGs Desa 4	88.050.658.726	3,73%	46.101.175.654	1,59%
SDGs Desa 5	15.623.941.515	0,66%	4.015.655.748	0,14%
SDGs Desa 6	24.831.282.384	1,05%	33.359.135.985	1,15%

SDGs Desa 7	1.293.500.000	0,05%	1.629.084.600	0,06%
SDGs Desa 8	12.425.057.997	0,53%	34.518.995.884	1,19%
SDGs Desa 9	1.093.053.815.336	46,32%	1.110.915.422.283	38,38%
SDGs Desa 10	4.405.220.547	0,19%	7.848.176.574	0,27%
SDGs Desa 11	93.017.713.154	3,94%	38.470.280.828	1,33%
SDGs Desa 12	5.158.435.696	0,22%	8.743.383.796	0,30%
SDGs Desa 13	2.084.835.040	0,09%	3.182.396.085	0,11%
SDGs Desa 14	9.275.534.559	0,39%	11.022.470.216	0,38%
SDGs Desa 15	6.755.590.864	0,29%	5.103.628.021	0,18%
SDGs Desa 16	46.841.001.374	1,98%	24.023.560.338	0,83%
SDGs Desa 17	1.465.557.823	0,06%	2.292.814.900	0,08%
SDGs Desa 18	29.474.537.053	1,25%	34.953.619.748	1,21%
Total SDGs Desa	1.760.856.013.923	74,62%	1.802.609.093.447	62,28%
Total Dana Desa	2.359.814.340.712		2.894.391.246.815	

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu (diolah)

Selain itu, terdapat pula beberapa nomor SDGs Desa yang memiliki realisasi kegiatan dana desa yang relatif rendah (di bawah 0,1%), yaitu SDGs Desa nomor 1 (Desa Tanpa Kemiskinan), 7 (Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan), 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim), 15 (Desa Peduli Lingkungan Darat), dan 17 (Kemitraan untuk Pembangunan Desa). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan dana desa di Cianjur dan Bogor belum sepenuhnya berfokus pada keseluruhan capaian SDGs Desa, sehingga beberapa capaian SDGs Desa tersebut belum mendapatkan perhatian serius. Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian Permatasari et al. (2021) dan Marianti et al. (2023) yang menyebutkan bahwa sebagian besar dana desa hanya digunakan untuk mendukung capaian SDGs nomor 9 dan 11, sedangkan beberapa capaian SDGs lainnya cenderung diabaikan.

Untuk uraian jenis kegiatan dana desa yang paling banyak direalisasikan di Kabupaten Cianjur dan Bogor disajikan pada Tabel 3. Pada tabel tersebut, diketahui bahwa mayoritas dana desa di Cianjur dan Bogor digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa/pemukiman/gang. Selama tahun 2018-2023, jumlah realisasi dana desa untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa tersebut mencapai Rp856 miliar di Cianjur dan mencapai Rp938 miliar di Bogor.

Tabel 3. Kegiatan Dana Desa dengan Realisasi Terbesar di Kab. Cianjur dan Bogor

Kabupaten Cianjur	
Nama Kegiatan	Realisasi 2018-2023 (Rp)
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	541.302.293.603
2. Pemeliharaan Jalan Desa	129.716.746.586
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	119.639.433.995
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	99.222.915.610
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	66.056.833.471
Kabupaten Bogor	

Nama Kegiatan	Realisasi 2018-2023 (Rp)
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	458.349.403.494
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	357.516.066.573
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	122.021.169.672
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	101.804.649.715
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	70.914.501.785

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu (diolah)

Menurut Sasmito et al., (2017), pembangunan jalan desa diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang maupun jaringan transportasi bagi masyarakat desa meskipun terdapat beberapa tantangan seperti akses ke lokasi sempit dan sumber daya kurang baik. Selain itu, pada awal mula penyaluran dana desa juga terdapat arahan prioritas penggunaan dana desa bagi pembangunan infrastruktur desa sehingga mayoritas penggunaan dana desa di awal penyalurannya memang mayoritas akan digunakan untuk pembangunan fisik. Secara umum, dapat diketahui bahwa prioritas pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Cianjur dan Bogor cenderung berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan jalan desa guna memperlancar akses dan jaringan transportasi desa. Adapun hasil *mapping* per tahun untuk Kabupaten Cianjur dan Bogor dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4.

Hasil Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel lingkup Kabupaten Cianjur dan Bogor digunakan untuk mengetahui bagaimana proporsi kegiatan dana desa yang mendukung SDGs Desa berkontribusi terhadap nilai IDM. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pemilihan model terbaik yang digunakan dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Berdasarkan hasil uji pemilihan model yang ditampilkan pada Tabel 4., diperoleh kesimpulan bahwa model terbaik yang digunakan untuk Kabupaten Cianjur dan Bogor adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 4. Uji Pemilihan Model

Uji	Cianjur			Bogor		
	Hipotesis	Prob. Chi-Square	Keputusan	Hipotesis	Prob. Chi-Square	Keputusan
Chow	H ₀ : CEM H ₁ : FEM	0,0000	FEM	H ₀ : CEM H ₁ : FEM	0,0000	FEM
Hausman	H ₀ : REM H ₁ : FEM	0,0000	FEM	H ₀ : REM H ₁ : FEM	0,0000	FEM
Lagrange Multiplier	H ₀ : CEM H ₁ : REM	0,0000	REM	H ₀ : CEM H ₁ : REM	0,0000	REM

Sumber: diolah penulis

Setelah melakukan uji pemilihan model dan diketahui model yang terpilih, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa persamaan regresi telah memenuhi asumsi *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*. Uji Asumsi Klasik yang dilakukan yaitu Uji

Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas dengan hasil yang ditampilkan pada Tabel 5. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tersebut, diketahui bahwa terjadi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, berdasarkan penjelasan dari Gujarati & Porter (2008) dan Wooldridge (2018), maka perlu dilakukan regresi dengan *Generalized Least Square (GLS)*.

Tabel 5. Uji Asumsi Klasik

Uji	Hipotesis	Cianjur		Bogor	
		Prob. Chi-Square	Hasil	Prob. Chi-Square	Hasil
Multikolinieritas	H ₀ : vip>10 H ₁ : vip<10	9,14	Tidak ada Multikolinieritas	2.83	Tidak ada Multikolinieritas
Autokorelasi	H ₀ : p<5% H ₁ : p>5%	0,0000	Terjadi auto-korelasi	0,0000	Terjadi auto-korelasi
Heteroskedastisitas	H ₀ : p<5% H ₁ : p>5%	0,0000	Heteroskedastisitas	0,0001	Heteroskedastisitas

Sumber: diolah penulis

Selanjutnya, setelah diketahui model yang terpilih dan penanganan untuk masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas, maka dilakukan regresi dengan *Generalized Least Square (GLS)* seperti yang ditampilkan pada Tabel 6. Berdasarkan hasil regresi pada persamaan (1) dan (3), dapat diketahui bahwa realisasi dana desa yang dilakukan di Kabupaten Cianjur maupun di Kabupaten Bogor sama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Namun demikian, realisasi dana desa di Kabupaten Bogor memiliki kontribusi yang relatif lebih besar terhadap nilai IDM dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0262, sedangkan nilai koefisien regresi dana desa terhadap nilai IDM di Kabupaten Cianjur sebesar 0,0057. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor dinilai lebih efektif untuk meningkatkan nilai IDM daripada di Kabupaten Cianjur.

Selain itu, pada persamaan (2) dan (4), dapat diketahui bahwa proporsi kegiatan pada SDGs Desa 9 (infrastruktur dan inovasi desa) yang memiliki realisasi paling tinggi justru berkontribusi negatif dan signifikan terhadap nilai IDM di Kabupaten Cianjur dan Bogor. Menurut Hilmawan et al. (2023), hal tersebut dapat diakibatkan oleh pengalihan alokasi belanja infrastruktur menjadi program BLT Desa untuk penanggulangan Covid-19 sehingga alokasi untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi indikasi bahwa terdapat pelaksanaan belanja infrastruktur yang kurang efisien, ataupun kurang terintegrasinya pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat lokal (Aritenang, 2020; Gansauer et al., 2024; World Bank, 2020)

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan hasil yang terjadi antara Kabupaten Cianjur dan Bogor yang berkaitan dengan karakteristik mayoritas desa di kedua Kabupaten tersebut. Kegiatan SDGs Desa yang berkontribusi positif dan signifikan terhadap nilai IDM di Kabupaten Cianjur adalah SDGs Desa 1 (Desa Tanpa Kemiskinan), SDGs Desa 5 (Keterlibatan Perempuan Desa), SDGs Desa 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim), dan SDGs Desa 17 (Kemitraan Untuk Pembangunan Desa) yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan, kesadaran terkait perubahan iklim dan lingkungan, serta produksi serta konsumsi berkelanjutan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran terhadap perubahan iklim, ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan sangat penting diterapkan untuk pembangunan desa-desa di Kabupaten Cianjur.

Menurut penelitian dari Muharam & Sutoni (2020) dan Wibisonya (2021), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor unggulan yang juga menjadi motor penggerak dalam mengembangkan sektor lainnya di Kabupaten Cianjur. Sementara itu menurut Asikin (2010), adanya perubahan iklim di Kabupaten Cianjur akan menyebabkan penurunan pendapatan di sektor pertanian sebesar 0,91%. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang memperhatikan kesadaran terhadap perubahan iklim, ketahanan pangan dan sumber daya yang berkelanjutan akan meningkatkan efektifitas sektor pertanian dan perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Cianjur.

Adapun untuk Kabupaten Bogor, kegiatan SDGs Desa yang berkontribusi positif dan signifikan terhadap nilai IDM relatif cukup merata. Namun demikian, SDGs Desa 16 yang berkaitan dengan Desa yang Damai dan Berkeadilan, memiliki kontribusi paling tinggi terhadap nilai IDM. Hal tersebut berkaitan erat dengan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak perekonomian di desa-desa Kabupaten Bogor. Menurut Musthofa et al. (2022), sektor pariwisata memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Bogor dengan menarik banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Sementara itu menurut Devi et al. (2023), keamanan, keselamatan dan kepastian perlindungan hukum berperan penting dalam meningkatkan jumlah wisatawan. Memperhatikan hal tersebut, efektivitas pengelolaan dana desa untuk mencapai SDGs Desa 16 berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan Bogor.

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel lingkup Kabupaten Cianjur dan Bogor

Variabel Independen	Variabel Dependen = IDM			
	Cianjur		Bogor	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Konstanta (C)	0.5855*** (0.0471)	0.6936*** (0.0024)	0.1920*** (0.0594)	0.7312*** (0.0025)
dana desa (vill_fund)	0.0057** (0.0023)	-	0.0262*** (0.0029)	-
psdgs1	-	0.6315*** (0.2248)	-	0.2986*** (0.1154)
psdgs2	-	0.0567*** (0.0085)	-	0.1364*** (0.0099)
psdgs3	-	0.0518*** (0.0090)	-	0.0574*** (0.0100)
psdgs4	-	0.0162* (0.0088)	-	0.0504*** (0.0173)
psdgs5	-	0.1550** (0.0604)	-	0.3144** (0.1315)
psdgs6	-	0.0241 (0.0171)	-	0.0069 (0.0201)
psdgs7	-	0.0641 (0.0974)	-	0.3294*** (0.1265)
psdgs8	-	0.0425 (0.0261)	-	0.0268** (0.0134)
psdgs9	-	- 0.0160*** (0.0028)	-	- 0.0467*** (0.0031)
psdgs10	-	0.1084* (0.0559)	-	0.2688*** (0.0839)
psdgs11	-	- 0.0195** (0.0086)	-	0.0426*** (0.0155)
psdgs12	-	0.0927	-	0.0897**

		(0.0574)		(0.0377)
psdgs13	-	0.3376** (0.1507)	-	0.2109* (0.1108)
psdgs14	-	0.0755** (0.0309)	-	0.0932** (0.0403)
psdgs15	-	0.0761** (0.0372)	-	0.0776 (0.0573)
psdgs16	-	0.2919*** (0.0262)	-	0.5809*** (0.0510)
psdgs17	-	0.5294*** (0.1782)	-	0.1899* (0.1003)
psdgs18	-	0.0786*** (0.0295)	-	0.1732*** (0.0275)
Obs. (n)	2.123	2.124	2.474	2.496
Prob.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Signifikan pada * $\alpha < 10\%$, ** $\alpha < 5\%$, *** $\alpha < 1\%$

Sumber: diolah Penulis

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil regresi tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan karakteristik mayoritas desa yang berada di Kabupaten Cianjur dan Bogor. Hal tersebut menjadikan arah prioritas pembangunan desa yang juga berbeda dimana prioritas pembangunan di Cianjur lebih cenderung ke arah kesadaran perubahan iklim, ketahanan pangan, dan sumber daya lingkungan yang keberlanjutan, sedangkan prioritas pembangunan di Bogor lebih cenderung ke arah ketertiban, keamanan serta kepastian hukum.

Selain itu, apabila dibandingkan antara kedua Kabupaten tersebut, Kabupaten Bogor dinilai memiliki pengelolaan dana desa yang lebih seimbang dan komprehensif dibandingkan Cianjur dalam menyelaraskan dana desa dengan SDGs Desa. Hal tersebut ditunjukkan dengan proporsi SDGs Desa di Bogor yang lebih seimbang sehingga jumlah SDGs Desa yang berkontribusi positif dan signifikan terhadap nilai IDM lebih banyak di Bogor dibandingkan dengan Cianjur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa dan integrasinya dalam implementasi SDGs Desa di Bogor lebih terfokus, efektif dan komprehensif dalam meningkatkan pembangunan desa dibandingkan dengan Cianjur. Memperhatikan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua proporsi kegiatan dana desa yang mendukung SDGs Desa memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap nilai IDM di Kabupaten Cianjur dan Bogor, sehingga Hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak.

Hasil *Difference in Differences (DiD)*

Metode analisis berikutnya yaitu dengan menggunakan *difference in differences (DiD)* yang bertujuan untuk mengukur dan membandingkan dampak dari kebijakan SDGs Desa terhadap nilai IDM di Kabupaten Cianjur dan Bogor. Sebelum melakukan analisis DiD, untuk menguji validitas metode DiD terlebih dahulu dilakukan uji asumsi tren paralel yang merujuk pada penelitian oleh Dette & Schumann (2024) dengan menguji signifikansi hasil regresi dari IDM dengan variabel interaksi *dummy treatment* dengan *dummy pre period* sebelum periode *treatment* (2018-2020). Berdasarkan hasil uji asumsi tren paralel, diketahui bahwa hubungan IDM dengan variabel interaksi *dummy treatment* dengan *dummy pre period* tidak signifikan secara statistik dengan nilai p-value sebesar 0,616, artinya trend nilai IDM antara kelompok *control* dan kelompok *treatment* sebelum adanya kebijakan SDGs Desa adalah sama, sehingga asumsi tren paralel untuk metode DiD terpenuhi.

Berdasarkan hasil regresi dengan metode DiD pada *Outcome Variable* (1) di Tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai DiD untuk desa-desa di Kabupaten Cianjur adalah sebesar 0,021 dan

signifikan secara statistik, sedangkan untuk hasil DiD Kabupaten Bogor adalah sebesar 0,024 dan signifikan secara statistik. Memperhatikan hasil DiD pada kedua Kabupaten tersebut, dapat diketahui bahwa program SDGs Desa telah berhasil dilaksanakan dengan baik baik di Kabupaten Cianjur maupun di Bogor sehingga dapat memberikan perbedaan yang positif terhadap nilai IDM dari desa-desa yang mengimplementasikan SDGs Desa. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis DiD di kedua Kabupaten tersebut yang bernilai positif dan signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 pada penelitian ini dapat diterima.

Namun demikian, jika dibandingkan antara kedua Kabupaten tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Bogor memiliki nilai DiD yang lebih tinggi daripada Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program SDGs Desa di Kabupaten Bogor dilakukan dengan lebih baik daripada di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut pula yang menjadi indikasi penyebab perbedaan nilai IDM antara kedua Kabupaten tersebut yang dibahas pada bagian latar belakang dimana nilai IDM Kabupaten Bogor meningkat secara signifikan setelah tahun 2020, sedangkan nilai IDM Kabupaten Cianjur relatif lebih stagnan setelah tahun 2020 meskipun sama-sama mengalami peningkatan.

Tabel 7. Hasil *Difference in Difference* Kabupaten Cianjur dan Bogor

Kabupaten Cianjur					Kabupaten Bogor				
Outcome var. (1)	idm	S. Err.	t	P> t	Outcome var. (1)	idm	S. Err.	t	P> t
Before					Before				
Control	0,690				Control	0,717			
Treated	0,673				Treated	0,684			
Diff (T-C)	-0,017	0,008	-2,11	0,036**	Diff (T-C)	-0,033	0,004	-9,86	0,000***
After					After				
Control	0,739				Control	0,795			
Treated	0,744				Treated	0,786			
Diff (T-C)	0,004	0,005	2,88	0,379	Diff (T-C)	-0,009	0,005	1,70	0,090*
DiD	0,021	0,009	2,46	0,014**	DiD	0,024	0,006	4,30	0,000***
Obs. (n)	Before	After	Total		Obs. (n)	Before	After	Total	
Control	256	338	594		Control	601	492	1.093	
Treated	806	724	1.530		Treated	647	756	1.403	
Total	1.062	1.062			Total	1.248	1.248		
R-Square	0,14	Obs.	2.124		R-Square	0,28	Obs.	2.496	

Signifikan pada * $\alpha < 10\%$, ** $\alpha < 5\%$, *** $\alpha < 1\%$

Sumber: diolah penulis

Tabel 8. Proporsi Rata-rata Kegiatan SDGs Desa Kabupaten Cianjur dan Bogor Tahun 2018-2020 dan 2021-2023

SDGs Desa	Cianjur		Bogor	
	2018-2020	2021-2023	2018-2020	2021-2023
psdgs1	0,02%	0,13%	0,00%	0,08%
psdgs2	1,12%	10,40%	0,68%	12,04%
psdgs3	5,42%	10,29%	3,75%	12,23%
psdgs4	5,00%	2,52%	1,34%	1,81%
psdgs5	0,54%	0,78%	0,16%	0,12%
psdgs6	1,10%	1,00%	1,44%	0,90%
psdgs7	0,04%	0,07%	0,00%	0,10%
psdgs8	0,57%	0,49%	0,85%	1,49%

SDGs Desa	Cianjur		Bogor	
	2018-2020	2021-2023	2018-2020	2021-2023
psdgs9	63,67%	29,80%	54,31%	24,53%
psdgs10	0,06%	0,31%	0,19%	0,34%
psdgs11	4,75%	3,17%	1,41%	1,26%
psdgs12	0,06%	0,37%	0,17%	0,42%
psdgs13	0,00%	0,17%	0,01%	0,19%
psdgs14	0,02%	0,75%	0,03%	0,69%
psdgs15	0,09%	0,48%	0,18%	0,18%
psdgs16	0,53%	3,37%	0,10%	1,47%
psdgs17	0,03%	0,09%	0,03%	0,12%
psdgs18	0,30%	2,15%	0,24%	2,05%
mean	4,63%	3,68%	3,60%	3,33%
std. dev	14,85%	7,25%	12,69%	6,47%

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu (diolah)

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa penyaluran dana desa ke dalam SDGs Desa di Kabupaten Bogor dilakukan dengan lebih seimbang dan komprehensif. Hal tersebut terlihat dari proporsi SDGs Desa yang mayoritas berkontribusi positif dan signifikan di Bogor dibandingkan dengan Cianjur. Selain itu, proporsi kegiatan SDGs Desa Kabupaten Bogor yang lebih seimbang tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. dimana sejak diimplementasikannya SDGs Desa di tahun 2021, kegiatan dana desa di Kabupaten Bogor menjadi lebih merata dan tidak hanya terfokus pada SDGs Desa 9 yang nilainya sudah turun secara signifikan dibanding Cianjur.

Selain itu, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi efektifitas penerapan SDGs Desa di Kabupaten Cianjur dan Bogor yaitu pemahaman dan tingkat pendidikan dari Kepala Desa. Dana desa akan lebih efektif dalam meningkatkan status desa dan pertumbuhan ekonomi desa apabila Kepala Desa memiliki pendidikan di atas SMA/SLTA (Nadia & Mahi, 2023; Permatasari et al., 2021). Adapun menurut data Dinas PMD Provinsi Jawa Barat, Kepala Desa di Kabupaten Cianjur yang memiliki pendidikan di atas SMA/SLTA pada tahun 2020 adalah sebanyak 36,72%, sedangkan di Kabupaten Bogor sebanyak 42,07%, artinya mayoritas Kepala Desa di Kabupaten Bogor memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari Kepala Desa di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan penjelasan dari penelitian dari Nadia & Mahi (2023) maka dapat diindikasikan bahwa para Kepala Desa di Kabupaten Bogor mampu memahami dan menjalankan program SDGs Desa dengan lebih efektif dibandingkan di Kabupaten Cianjur.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dana desa di Kabupaten Cianjur dan Bogor mayoritas digunakan untuk kegiatan yang mendukung capaian SDGs Desa nomor 9 (Infrastruktur dan Inovasi Desa) sementara beberapa capaian SDGs Desa lain belum mendapatkan perhatian. Sementara itu, nilai IDM di Cianjur justru paling banyak dipengaruhi oleh SDGs Desa 13 yaitu Desa Tanggapan Perubahan Iklim, sedangkan nilai IDM di Bogor paling banyak dipengaruhi oleh SDGs Desa 16 yaitu Desa Damai dan Berkeadilan. Hal tersebut berkaitan erat dengan karakteristik mayoritas desa di kedua Kabupaten tersebut yang berbeda dimana sektor unggulan desa-desa di Kabupaten Cianjur adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga kesadaran terhadap perubahan iklim, lingkungan dan sumber daya yang berkelanjutan sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Cianjur, sedangkan sektor unggulan desa-desa di Kabupaten Bogor adalah sektor pariwisata sehingga kondisi ketertiban,

keamanan, dan kepastian hukum sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bogor.

Adapun hasil analisis dengan DiD menunjukkan bahwa penerapan SDGs Desa di Kabupaten Cianjur dan Bogor telah berjalan dengan baik, namun Kabupaten Bogor dinilai lebih baik mengimplementasikan SDGs Desa daripada penerapan di Cianjur. Hal tersebut berkaitan erat dengan penyelarasan penggunaan dana desa di Bogor yang lebih merata, seimbang dan komprehensif untuk mencapai keseluruhan target SDGs Desa dibandingkan dengan Cianjur. Selain itu, tingkat pendidikan kepala desa di Bogor yang lebih tinggi dari Cianjur juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemahaman terhadap suatu program menjadi lebih baik sehingga program SDGs Desa dapat diterapkan lebih baik di Bogor.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini turut berkontribusi dalam mendukung teori transfer antar-level pemerintahan (*intergovernmental transfer*) yang menyebutkan bahwa dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah/Desa akan meningkatkan pembangunan di daerah perdesaan. Hasil empiris dari pengelolaan transfer dana desa di Kab. Cianjur dan Bogor pada penelitian ini dapat menjadi bukti yang mendukung teori tersebut.

Selanjutnya, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan berdasarkan temuan pada penelitian ini diantaranya yaitu Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Desa dapat menetapkan kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga pada pembangunan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga pembangunan desa menjadi lebih seimbang, efektif, dan holistik. Peningkatan kapasitas aparatur/pegawai dan masyarakat desa juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik desa, sehingga realisasi belanja infrastruktur yang tinggi akan lebih efektif dalam meningkatkan pembangunan desa. Selain itu, penyelarasan kegiatan dana desa ke dalam keseluruhan target SDGs Desa juga tetap harus dilakukan untuk memastikan pembangunan desa menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu belum diperhitungkannya dampak dari adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2023. Penelitian ini juga belum memperhitungkan dampak dari adanya bencana alam yang memungkinkan terjadinya kerusakan pada infrastruktur desa yang terjadi di beberapa wilayah desa di Cianjur dan Bogor. Penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang terkait pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa yang turut memperhitungkan faktor-faktor tersebut di atas dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P., Puspita, M. E., Wibowo, M. A., Kusumaningrum, D., & Santoso, A. (2023). The Effect of Good Government Governance on Developing Village Index (IDM) Through Sustainable Development Goals (SDGs) (Empirical Study In Kedungjati District, Grobogan Regency). *Journal of Economics and Public Health*, 2(3), 75–82. <https://doi.org/10.37287/jeph.v2i3.1982>
- Aji, Y. I. T., & Qibthiyyah, R. M. (2023). Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 30–54. <https://doi.org/10.21002/jepi.2023.03>
- Andari, R. N., & Fitria, R. (2023). Village Funds Policy and its Impact on Improvement and Autonomy Status of Villages in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2023(1), 1–30. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13537>

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79(September), 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Aritenang, A. F. (2020). The effect of intergovernmental transfers on infrastructure spending in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 25(3), 571–590. <https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1675352>
- Asikin, Z. (2010). *Analisis dampak perubahan iklim terhadap pendapatan petani padi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat*.
- Dette, H., & Schumann, M. (2024). Testing for Equivalence of Pre-Trends in Difference-in-Differences Estimation. *Journal of Business and Economic Statistics*, 0(0), 1–28. <https://doi.org/10.1080/07350015.2024.2308121>
- Devi, A. Y., Rusmini, A., Tinggi, S., Ambarrukmo, P., Artikel, I., Kunci, K., & Hukum, P. (2023). *Keamanan dan Keselamatan: Perlindungan Hukum Terhadap Parawisatawan*. 1–8.
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 185–192.
- Fitriana, N. E., & Qibthiyah, R. M. (2021). Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan di Indonesia. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(1), 19–44.
- Gansauer, G., Haggerty, J. H., Smith, K. K., Haggerty, M. N., & Roemer, K. F. (2024). Can infrastructure help “left behind” places “catch up?” Theorizing the role of built infrastructure in regional development. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 17(2), 393–406. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsad032>
- Gujarati, D., & Porter, D. (2008). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill Education.
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Iskandar, A. H. (2024). *SDGs Desa: Metodologi dan Pengukuran (Trilogi SDGs Desa #2)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=3db-EAAAQBAJ>
- Kemendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Kemendesa. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta, 1–65. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016
- Kemendesa. (2020a). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 73.
- Kemendesa. (2020b). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020*. 16, 32.
- Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7.
- Kemenkeu. (2020a). *Buku Pintar Dana Desa*. 8–37. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSszMLUcN-0NQ0hbL
- Kemenkeu. (2020b). *Peraturan menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa*. 8.
- Kemenkeu. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Kemenkeu. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 Tentang*

- Pengelolaan Dana Desa*. 36. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/1810ae54-82a0-4fc1-b56b-6a5abe472f18/201~PMK.07~2022Per.pdf>
- Kemenkeu. (2023). *Permenkeu No 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*. 1–56.
- Kurniawan, A., & Rauf, R. (2022). Effectiveness Of Using Village Funds In Improving Village Status Based On The Building Village Index (Idm) In Kuantan Singingi Regency. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 45–55. [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(2\).9534](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(2).9534)
- Marianti, M. M., Permatasari, P., Manurung, E. M., Wardhana, I. W., Alim, T. E., & Wahyuputri, F. W. (2023). Village Fund for Renewable Energy Development: A Case Study of Rural Area in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(4), 225–236. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14541>
- Muharam, M. L., & Sutoni, A. (2020). *Analisis Sektor Unggulan sebagai Potensi Industri di Kabupaten Cianjur dengan Menggunakan Metode Shift Share*. November, 1–10.
- Musthofa, B. M., Kanisa, P. A., & Mukhlis, B. M. (2022). *Bogor City Tourism Promotion Strategy through the Calendar of Events 2022* †. 1–5.
- Nadia, A., & Mahi, B. R. (2023). Village Development: Effect of Village Fund and Village Head Education. *Economics Development Analysis Journal*, 12(2), 141–156. <https://doi.org/10.15294/edaj.v12i2.66675>
- Nurkamil, Y. (2015). Peran Sektor Perikanan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Cianjur. *Repository Institute Pertanian Bogor*.
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Ramdani, S. A. (2024). Dampak Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial dari APBD Terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 58–78. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.524>
- Rezki, L. S., & Yunani, A. (2023). Pengaruh Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Barabai. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 858. <https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11067>
- Ronaldo, R., & Suryanto, T. (2022). Green finance and sustainability development goals in Indonesian Fund Village. *Resources Policy*, 78(December 2021), 102839. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102839>
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public Finance*. Global ed. *New York*.
- Sasmito, C., Studi, P., Administrasi, I., Tribhuwana, U., & Malang, T. (2017). *Implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa*. 6(3), 72–76.
- Sutisna, A., & Qibthiyah, R. M. (2023). *The Impact of Community-Driven Development Program on Rural Households Economic Well-being: Evidence from Village Funds Dampak Program Community-Driven Development pada Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Perdesaan : Bukti Empiris dari Dana Desa*. 14(225), 406–417. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i3.7525>. Abstrak
- Swan, J. E., & Martin, W. S. (1994). The Theory-Setting-Testable Hypothesis Model: A Framework to Assist Doctoral Students in Linking Theory and Empirical Research. *Marketing Education Review*, 4(3), 2–15. <https://doi.org/10.1080/10528008.1994.11488463>
- Triastuti, M. R. H. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs) Contents in the Design of Medium Term Development Plan (RPJM) of Pelitaasih Village Selaawi District of Garut Regency. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, 6(3s), 594–601.
- Vecky Masinambow, E. N. W. A. I. S. A. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/35490>
- Villa, J. M. (2016). diff: Simplifying the estimation of difference-in-differences treatment effects. *Stata Journal*, 16(1), 52–71. <https://doi.org/10.1177/1536867x1601600108>
- Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest Policy and*

- Economics*, 108(June 2018), 101863. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008>
- Wibisonya, I. (2021). Analisis sektor unggulan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten cianjur provinsi jawa barat. 1(1), 10–17.
- Wooldridge, J. M. (2018). *Introductory Econometrics*. Cengage Learning. Inc.
- World Bank. (2020). *Spending for Better Results*. 305.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>
- Yusuf, M., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Relationship of Village Funds With Village Economic Development: A Village Level Study in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 493–504. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.493-504>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Mapping Kode Kegiatan Dana Desa yang mendukung SDGs Desa

SDGs Desa	Kode Kegiatan Dana Desa
SDGs Desa 1 Desa Tanpa Kemiskinan	1503, 1305, 3106
SDGs Desa 2 Desa Tanpa Kelaparan	4201, 4105, 4205, 4204, 4205, 4204, 4201, 4202, 4203, 4290-99
SDGs Desa 3 Desa Sehat dan Sejahtera	2201, 2201, 2204, 2207, 2208, 2209, 4403, 2202, 2203, 2205, 2290-99
SDGs Desa 4 Pendidikan Desa Berkualitas	2105, 2101, 2106, 2108, 2107, 2110, 4403, 4602, 4501, 2306, 2315, 3302, 3390-99, 2190-99
SDGs Desa 5 Keterlibatan Perempuan Desa	4402, 4401, 4490-99
SDGs Desa 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	2402, 2403, 2410, 2412, 2413, 2414
SDGs Desa 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	2702, 2701
SDGs Desa 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	1101, 1102, 4501, 4503, 4601, 4502, 4703, 2801, 2802, 2803, 2390-99, 4790-99
SDGs Desa 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	2304, 2313, 1203, 1201, 1202, 4701, 4702, 2306, 2315, 3305, 4502, 4702, 2690-99, 2802, 3305, 2301, 2601, 3205, 1408
SDGs Desa 10 Desa Tanpa Kesenjangan	4401, 4402, 1301, 1101, 1102, 1409, 4690-99
SDGs Desa 11 Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	1411, 3203, 3104, 3305, 2316, 2407, 2415, 1203, 2702, 4590-99, 1504, 1506, 1502, 1504
SDGs Desa 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	2407, 2408, 2426, 4103
SDGs Desa 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim	3104, 3105
SDGs Desa 14 Desa Peduli Lingkungan Laut	4101, 4102, 4105, 4190-99, 4190-99
SDGs Desa 15 Desa Peduli Lingkungan Darat	1505, 1507, 2501, 2502, 4290-99
SDGs Desa 16 Desa Damai Berkeadilan	1104, 1301, 1403, 1404, 1407, 1490-99, 3101, 3102
SDGs Desa 17 Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	1301-99, 2317, 2318, 1506
SDGs Desa 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	1302, 1303, 1406, 1401, 1402, 2317, 1403, 1404, 4602, 3203, 3401, 1201, 1405

Sumber: Iskandar (2024); Permatasari et al. (2021)

Lampiran 2. Statistik Deskriptif Kabupaten Cianjur dan Bogor

Kabupaten Cianjur					
Variabel	Obs.	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Indeks Desa Membangun (<i>idm</i>)	2.124	0,5090	0,9830	0,7098	0,0884
Dana Desa (<i>vill_fund</i>)	2.124	0	2.555.113.000	1.111.023.701	270.395.780
SDGs Desa 1 (<i>sdgs1</i>)	2.124	0	38.238.370	832.259	2.950.657
SDGs Desa 2 (<i>sdgs2</i>)	2.124	0	541.313.000	65.236.960	104.499.170
SDGs Desa 3 (<i>sdgs3</i>)	2.124	0	461.230.000	87.932.349	69.359.110
SDGs Desa 4 (<i>sdgs4</i>)	2.124	0	895.560.000	41.455.112	87.793.926
SDGs Desa 5 (<i>sdgs5</i>)	2.124	0	165.793.500	7.355.905	12.429.839
SDGs Desa 6 (<i>sdgs6</i>)	2.124	0	594.474.600	11.690.811	42.616.087
SDGs Desa 7 (<i>sdgs7</i>)	2.124	0	268.000.000	608.992	10.982.138
SDGs Desa 8 (<i>sdgs8</i>)	2.124	0	441.452.150	5.849.839	24.653.535
SDGs Desa 9 (<i>sdgs9</i>)	2.124	0	1.706.370.000	514.620.440	330.447.095
SDGs Desa 10 (<i>sdgs10</i>)	2.124	0	216.820.000	2.074.021	9.703.670
SDGs Desa 11 (<i>sdgs11</i>)	2.124	0	534.792.300	43.793.650	67.253.773
SDGs Desa 12 (<i>sdgs12</i>)	2.124	0	246.000.000	2.428.642	15.752.199
SDGs Desa 13 (<i>sdgs13</i>)	2.124	0	100.000.000	981.561	5.776.333
SDGs Desa 14 (<i>sdgs14</i>)	2.124	0	286.766.000	4.367.013	21.832.161
SDGs Desa 15 (<i>sdgs15</i>)	2.124	0	350.000.000	3.180.598	19.919.291
SDGs Desa 16 (<i>sdgs16</i>)	2.124	0	194.043.500	22.053.202	29.653.764
SDGs Desa 17 (<i>sdgs17</i>)	2.124	0	63.454.200	689.999	4.090.039
SDGs Desa 18 (<i>sdgs18</i>)	2.124	0	203.387.400	13.876.901	25.279.556
Kabupaten Bogor					
Variabel	Obs.	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Indeks Desa Membangun (<i>idm</i>)	2.496	0,5098	0,9981	0,7448	0,0877
Dana Desa (<i>vill_fund</i>)	2.496	0	3.233.748.400	1.159.611.878	358.380.856
SDGs Desa 1 (<i>sdgs1</i>)	2.496	0	128.428.500	498.142	5.928.092
SDGs Desa 2 (<i>sdgs2</i>)	2.496	0	643.871.840	78.320.352	120.517.128
SDGs Desa 3 (<i>sdgs3</i>)	2.496	0	702.090.500	96.032.985	106.536.827
SDGs Desa 4 (<i>sdgs4</i>)	2.496	0	718.714.000	18.655.769	53.506.130
SDGs Desa 5 (<i>sdgs5</i>)	2.496	0	85.000.000	1.608.836	6.297.593
SDGs Desa 6 (<i>sdgs6</i>)	2.496	0	1.038.653.016	13.365.038	48.407.043
SDGs Desa 7 (<i>sdgs7</i>)	2.496	0	180.000.000	652.678	8.403.759
SDGs Desa 8 (<i>sdgs8</i>)	2.496	0	980.118.750	13.829.726	60.679.611
SDGs Desa 9 (<i>sdgs9</i>)	2.496	0	2.346.095.491	445.078.294	345.444.892
SDGs Desa 10 (<i>sdgs10</i>)	2.496	0	229.500.000	3.144.302	11.926.736
SDGs Desa 11 (<i>sdgs11</i>)	2.496	0	788.740.500	15.412.773	57.442.674
SDGs Desa 12 (<i>sdgs12</i>)	2.496	0	288.113.100	3.502.958	18.518.522
SDGs Desa 13 (<i>sdgs13</i>)	2.496	0	151.601.160	1.274.998	9.812.620
SDGs Desa 14 (<i>sdgs14</i>)	2.496	0	304.717.000	4.416.054	24.979.275
SDGs Desa 15 (<i>sdgs15</i>)	2.496	0	373.098.800	2.044.723	15.752.351
SDGs Desa 16 (<i>sdgs16</i>)	2.496	0	200.000.000	9.624.824	19.448.679
SDGs Desa 17 (<i>sdgs17</i>)	2.496	0	120.000.000	918.596	6.562.779
SDGs Desa 18 (<i>sdgs18</i>)	2.496	0	504.499.400	14.003.854	36.053.437

Lampiran 3. Hasil Mapping Kegiatan Dana Desa yang Mendukung Capaian SDGs Desa di Kabupaten Cianjur per Tahun

SDGs Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
SDGs Desa 1	54.715.000	81.904.000	91.980.000	344.667.630	271.251.600	923.200.370	1.767.718.600
SDGs Desa 2	6.299.486.090	3.778.360.765	2.765.595.600	4.188.857.850	84.437.282.949	37.093.720.377	138.563.303.631
SDGs Desa 3	10.037.804.015	26.430.514.477	25.928.822.782	44.527.089.245	35.726.835.406	44.117.243.699	186.768.309.624
SDGs Desa 4	9.159.339.438	27.741.481.858	20.670.704.188	10.561.867.142	9.416.796.580	10.500.469.520	88.050.658.726
SDGs Desa 5	711.050.950	3.108.802.225	2.402.852.633	2.996.014.240	3.475.937.777	2.929.283.690	15.623.941.515
SDGs Desa 6	10.896.000	12.402.561.200	276.576.500	3.445.096.050	3.003.636.320	5.692.516.314	24.831.282.384
SDGs Desa 7	-	250.250.000	250.250.000	250.000.000	378.000.000	165.000.000	1.293.500.000
SDGs Desa 8	1.808.719.599	2.722.637.509	2.004.227.209	2.092.430.300	1.587.471.820	2.209.571.560	12.425.057.997
SDGs Desa 9	212.033.973.742	282.174.742.776	238.696.396.586	121.798.524.577	74.582.795.246	163.767.382.409	1.093.053.815.336
SDGs Desa 10	11.461.000	202.764.000	444.554.700	752.514.433	720.068.574	2.273.857.840	4.405.220.547
SDGs Desa 11	19.451.760.825	23.502.780.573	11.745.184.933	15.663.187.975	6.679.212.726	15.975.586.122	93.017.713.154
SDGs Desa 12	35.000.000	701.782.300	-	742.758.446	2.618.640.100	1.060.254.850	5.158.435.696
SDGs Desa 13	24.317.100	19.647.320	12.061.000	685.132.080	773.186.220	570.491.320	2.084.835.040
SDGs Desa 14	21.960.500	88.883.500	88.883.500	147.384.400	6.305.678.459	2.622.744.200	9.275.534.559
SDGs Desa 15	224.548.400	573.582.000	182.788.090	471.450.500	2.338.088.450	2.965.133.424	6.755.590.864
SDGs Desa 16	861.189.150	1.289.183.733	3.910.177.660	13.077.283.560	9.780.527.092	17.922.640.179	46.841.001.374
SDGs Desa 17	5.076.000	89.485.500	305.383.600	524.972.124	242.757.749	297.882.850	1.465.557.823
SDGs Desa 18	1.121.194.500	1.467.745.150	874.003.400	17.855.515.594	3.345.802.126	4.810.276.283	29.474.537.053
Total Penyelarasan SDGs Desa	261.872.492.309	386.627.108.886	310.650.442.381	240.124.746.146	245.683.969.194	315.897.255.007	1.760.856.013.923
Dana Desa Total	316.104.365.762	401.790.270.954	433.252.922.076	427.211.587.825	438.800.839.201	342.654.354.894	2.359.814.340.712

Lampiran 4. Hasil *Mapping* Kegiatan Dana Desa yang Mendukung Capaian SDGs Desa di Kabupaten Bogor per Tahun

SDGs Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
SDGs Desa 1	22.000.000	15.000.000	20.400.000	934.372.580	103.240.000	148.350.000	1.243.362.580
SDGs Desa 2	5.094.666.264	2.708.629.422	1.307.462.688	2.393.204.640	100.016.431.094	83.967.205.531	195.487.599.639
SDGs Desa 3	7.403.924.785	16.594.000.412	26.432.156.538	70.053.592.988	66.238.259.887	52.976.395.958	239.698.330.568
SDGs Desa 4	4.907.461.264	6.567.983.646	6.587.216.365	7.701.062.406	8.510.839.100	11.826.612.873	46.101.175.654
SDGs Desa 5	313.176.650	1.254.856.099	541.626.050	574.371.290	400.868.700	930.756.959	4.015.655.748
SDGs Desa 6	200.346.000	12.584.211.701	6.575.364.194	5.650.309.212	2.404.652.256	5.944.252.622	33.359.135.985
SDGs Desa 7	-	58.500.000	-	62.420.000	285.000.000	1.223.164.600	1.629.084.600
SDGs Desa 8	1.154.840.900	7.080.622.514	3.233.264.950	15.532.416.840	3.575.994.170	3.941.856.510	34.518.995.884
SDGs Desa 9	252.682.419.535	355.563.476.579	122.946.625.944	123.583.699.830	90.821.840.211	165.317.360.184	1.110.915.422.283
SDGs Desa 10	127.129.560	1.282.073.636	1.131.111.904	1.827.163.060	1.528.221.904	1.952.476.510	7.848.176.574
SDGs Desa 11	4.949.368.429	10.381.371.011	3.700.564.443	5.817.702.915	4.388.649.270	9.232.624.760	38.470.280.828
SDGs Desa 12	57.881.042	1.151.340.473	1.087.974.681	1.620.716.680	2.413.585.450	2.411.885.470	8.743.383.796
SDGs Desa 13	-	91.950.000	87.436.000	921.336.463	932.296.772	1.149.376.850	3.182.396.085
SDGs Desa 14	159.538.100	194.835.565	56.750.000	374.230.800	5.192.523.201	5.044.592.550	11.022.470.216
SDGs Desa 15	693.976.861	719.426.045	943.720.588	685.165.970	1.534.277.157	527.061.400	5.103.628.021
SDGs Desa 16	101.272.000	597.668.333	581.308.399	6.093.191.781	1.964.101.620	14.686.018.205	24.023.560.338
SDGs Desa 17	-	242.075.700	210.000.000	762.923.245	685.491.255	392.324.700	2.292.814.900
SDGs Desa 18	552.234.455	1.924.299.411	742.070.099	23.502.989.702	3.009.339.291	5.222.686.790	34.953.619.748
Total Penyalarsan SDGs Desa	278.420.235.845	419.012.320.547	176.185.052.843	268.090.870.402	294.005.611.338	366.895.002.472	1.802.609.093.447
Dana Desa Total	350.704.515.618	486.152.623.189	509.544.801.568	523.684.855.644	542.088.789.991	482.215.660.805	2.894.391.246.815